



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

INTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN **CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru, dan Upaya Pencegahan Penyebaran dan Penularan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tentang Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 74/Kpts/V/2020 tentang Perpanjangan Penetapan “Status Tanggap Darurat” Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Barat, maka Bupati Halmahera Barat menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Halmahera Barat
3. Asisten Sekda
4. Pimpinan Perangkat Daerah
5. Camat dan Kepala Desa
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat
7. Pimpinan BUMD
8. ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

- KESATU : Pimpinan Unit agar dapat membagi tugas shift kerja ASN/Karyawan/Karyawati di unit kerja masing-masing, pada setiap hari kerja dan melaporkan ke Bupati Halmahera Barat melalui BKPSDM Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : ASN/Karyawan/Karyawati di Instansi Pemerintah/BUMD Kabupaten Halmahera Barat dapat bekerja di rumah/tempat tinggal, namun pimpinan unit kerja memastikan terdapat level pejabat struktural tetap melaksanakan tugasnya di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
- KETIGA : Memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), para Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pembaharuan data Aparatur Sipil Negara yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), adapun petunjuk pelaksanaan pembaharuan data tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- KEEMPAT : Menunda pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dari Daerah, kecuali dalam urusan tugas penting/mendesak serta mendapatkan persetujuan Bupati Halmahera Barat.
- KELIMA : Jika Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri/Daerah, harus dilakukan, maka kembalinya dari perjalanan dinas harus dilakukan karantina rumah/tempat karantina yang telah ditentukan selama 14 (empat belas) hari.
- KEENAM : Kegiatan-kegiatan Pemerintah yang melibatkan orang banyak seperti rapat-rapat, seminar, pelatihan, dan lainnya dapat ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
- KETUJUH : Membatasi aktivitas keramaian kecuali dalam kebutuhan mendesak.
- KEDELAPAN : Memastikan tugas-tugas kedinasan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- KESEMBILAN: Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (***work from home***) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diperpanjang sampai dengan **tanggal 28 Juni 2020**.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Juni 2020

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala BKDD	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY